BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, maka ditemukan sejumlah penelitian yang membahas tentang peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) antara lain sebagai berikut:

1. Yasa Muazhar, dengan judul "*Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran*" jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan model interaktif Miles and Heberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sudah tersusun dan ditetapkan pada tahun 2012, dalam pelaksanaan pengawasan bisa dikatakan belum optimal dikarenakan masih minimnya peralatan yang digunakan untuk mengawasi isi siaran di televisi. Pemberian sanksi yang dilakukan KPID Jawa Timur hanya sampai dengan sanksi administratif/teguran tertulis hingga pengurangan durasi program acara, hal ini dikarenakan minimnya kewenangan yang diberikan oleh KPID Jawa Timur dalam menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran isi siaran. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat telah dilakukan dengan serangkaian acara misalnya

pengawasan siaran kampanye melalui media televisi, sosialisasi, workshop serta literasi media.¹

2. Devi Rahayu, dengan judul "*Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotainment di Televisi*" penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang menjadi objek adalah peranan KPI terhadap tayangan infotainment di televisi dan yang menjadi subjek adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Hasil penelitian adalah KPI telah melakukan penerimaan aduan dari masyarakat khususnya program infotainment dan mengkaji lebih dalam dengan menganalisis tayangan infotainment di televisi. KPI juga telah memberikan sanksi terhadap pelanggaran infotainment berupa teguran dan peringatan. KPI bersama Komisi I DPR dan Dewan Pers telah menyepakati infotainment sebagai program non-faktual.²

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan objek penelitian sebelumnya, sehingga lebih mengarah pada persepsi mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah. Penelitian ini lebih pada permasalahan dan rumusan masalah baru, sehingga nantinya diharapkan penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya.

¹Yasa Muazhar, "*Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran*", Skripsi, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2014.

²Devi Rahayu, "*Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotainment di Televisi*" Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

B. Deskripsi Teoritik

1. Persepsi

a. Definisi Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception*, artinya penglihatan, tanggapan daya, memahami atau menanggapi.³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.⁴ Objek fisik umumnya memberi stimulus fisik yang sama, sehingga orang mudah memberi persepsi yang sama.

Persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.⁵

Persepsi adalah penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensasi kedalam *percept*⁶ objek dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan *percept* itu mengenali dunia.⁷ Shaleh dan Wahab menambahkan bahwa persepsi adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita (penginderaan) untuk

³John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia an English Indonesia Dictionary*, Cet. Ke-29, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 424.

⁴Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 759.

⁵Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 2, 2009, h. 445.

⁶Hasil dari proses perseptual (Lihat Rita L. Atkinson, dkk, *Pengantar Psikologi*, h. 276)

⁷Rita L. Atkinson, dkk, *Pengantar Psikologi*, Batam: Interaksara, Edisi ke- 11, Jilid 1, h. 276.

dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.⁸

Menurut Mubarak dalam bukunya *Psikologi Dakwah* mengatakan “persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi, sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru.”⁹ Sedangkan Rakhmat dalam buku *Psikologi Komunikasi* menjelaskan bahwa: “persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.”¹⁰

Deddy Mulyana dalam bukunya *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* mengatakan bahwa persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi dan

⁸Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, cet. 2, 2005, h. 88.

⁹Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2002, h. 109.

¹⁰Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994, h. 51.

sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas.¹¹

Dari beberapa uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa persepsi pada dasarnya merupakan suatu pengamatan melalui penginderaan terhadap sesuatu objek, kemudian diteruskan oleh syaraf-syaraf sensoris ke otak. Didalam otak, hasil pengamatan diproses secara sadar, sehingga individu yang bersangkutan dapat menyadari dan memberikan objek yang diamati sesuai dengan perhatian, kebutuhan, sistem nilai dan karakteristik kepribadian.

Adapun yang di maksud dari persepsi dalam penelitian ini adalah tanggapan, respon, maupun pandangan (hasil pengamatan) mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah.

b. Proses Persepsi

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut:

- 1) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak dan sedikit.
- 2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh

¹¹Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet. 9, 2007, h. 180.

berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

- 3) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.¹²

Udai Pareek menjelaskan tiap-tiap proses persepsi tersebut, yaitu:

- 1) Proses menerima rangsangan yaitu proses pertama dalam menerima rangsangan atau data dari berbagai sumber. Kebanyakan data diterima melalui pancaindra. Kita melihat sesuatu, mendengar, mencium, merasakan atau menyentuhnya. Sehingga kita mempelajari segi-segi lain dari sesuatu itu.
- 2) Proses menyeleksi rangsangan. Setelah diterima, rangsangan atau data diseleksi. Dalam proses menyeleksi rangsangan, ada dua kumpulan faktor menentukan seleksi rangsangan itu, yaitu:
 - a) Faktor-faktor intern yang memengaruhi seleksi persepsi yaitu kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum dan penerimaan diri.

¹²Alex Sobur, *Psikologi Umum ...*, h.447.

- b) Faktor-faktor ekstern yang memengaruhi seleksi persepsi yaitu intensitas, ukuran, kontras, gerakan, ulangan, keakraban dan sesuatu yang baru.
- 3) Proses pengorganisasian, ada tiga dimensi utama dalam pengorganisasian rangsangan yaitu pengelompokan, bentuk timbul dan latar serta kemantapan persepsi.
- 4) Proses penafsiran. Setelah rangsangan atau diterima dan diatur, si penerima lalu menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Dikatakan telah terjadi persepsi setelah data itu ditafsirkan. Persepsi pada pokoknya memberikan arti berbagai data dan informasi yang diterima.
- 5) Proses pengecekan. Pengecekan sesudah data diterima dan ditafsirkan, si penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah penafsirannya benar atau salah. Proses pengecekan ini mungkin terlalu cepat dan orang mungkin tidak menyadarinya. Pengecekan ini dapat dilakukan dari waktu ke waktu untuk menegaskan apakah penafsiran atau persepsi dibenarkan oleh data baru.¹³

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang tidak timbul begitu saja tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor inilah yang membuat seseorang dalam melihat atau merespon

¹³Alex Sobur, *Psikologi Umum ...*, h.451-464.

sesuatu yang sama akan memberikan interpretasi yang berbeda.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor fungsional, yaitu faktor yang dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seorang individu.
- 2) Faktor struktural, yaitu faktor yang timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem saraf individu.
- 3) Faktor situasional, yaitu faktor yang berkaitan dengan bahasa nonverbal. Misalnya petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, dan petunjuk paralinguistik.
- 4) Faktor personal, yaitu berupa pengalaman, motivasi, dan kepribadian.¹⁴

d. Teori tentang Persepsi (Teori S-O-R)

Teori S-O-R adalah singkatan dari Stimulus- Organism- Response ini semula berasal dari psikologi. Kalau kemudian menjadi juga teori komunikasi, tidak mengherankan karena objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi.

Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat

¹⁴Alex Sobur, *Psikologi Umum ...*, h.460-462.

mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi, unsur-unsur dalam model ini adalah:

- 1) Pesan (Stimulus, S)
- 2) Komunikan (Organism, O)
- 3) Efek (Response, R)

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya yakni penerimaan. Setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk menyatakan sikap.¹⁵

2. Mahasiswa

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mahasiswa berarti orang yang belajar di perguruan tinggi.¹⁶ Dengan demikian seseorang yang belajar atau secara administrasi terdaftar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi dapat disebut sebagai mahasiswa. Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang mempunyai tanggungjawab terhadap ilmu dan masyarakat yang melekat pada dirinya sesuai dengan “*tridarma*” lembaga tempat yang bernaung.

¹⁵Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, h. 254-256.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, h. 696.

Sebagai kaum intelektual mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *Agent Of Change*, mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa adalah salah satu harapan suatu bangsa agar bisa berubah ke arah yang lebih baik, hal ini dikarenakan mahasiswa dianggap memiliki intelek yang cukup bagus dan cara berpikir yang lebih matang, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah.
- b. *Iron Stock*, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi orang-orang tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Intinya mahasiswa merupakan aset cadangan, harapan bangsa untuk masa depan.
- c. *Social Control*, mahasiswa adalah pengontrol kehidupan sosial. Dalam hal ini mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, selain pintar dalam bidang akademis, mahasiswa juga harus pintar dalam bersosialisasi dan memiliki kepekaan dengan lingkungan.¹⁷

Dalam penelitian ini mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa IAIN Palangka Raya, yang tergolong aktif baik dari segi administrasi maupun dalam melakukan studinya.

¹⁷http://www.academia.edu/4631795/Peran_dan_Fungsi_Mahasiswa, (online pada tanggal 8 Maret 2015).

3. Peran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁸

Menurut Narwoko dan Suyanto peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Peran itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran.¹⁹ Antara peranan dan kedudukan sama-sama memiliki fungsi yang saling terkait bagaikan dua sisi mata uang, artinya tidak ada kedudukan tanpa peranan.²⁰

Soekanto menyatakan bahwa peran setidaknya mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*,h. 854.

¹⁹J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, ed. 4, cet. 5, Jakarta: Kencana, 2011, h. 158-159.

²⁰Lihat Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 435.

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²¹

Lebih jauh Soekanto juga menyatakan bahwa pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.²²

²¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, cet. 43, 2010, h. 213.

²²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, h. 216.

4. Penyiaran

a. Definisi Penyiaran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²³

b. Sistem Penyiaran

Ada beberapa sistem untuk menyebarluaskan siaran, yakni sebagai berikut:

1) Sistem Terrestrial

Sistem ini memancarkan signal di atas permukaan tanah dengan menggunakan microwave. Pancaran SHF (*Super High Frequency*) harus bebas hambatan.

2) Sistem Satelit

Sistem penyiaran ini memerlukan bantuan satelit. Satelit komunikasi adalah satelit yang dipergunakan khusus untuk keperluan komunikasi.

Satelit komunikasi ditempatkan di *Geo Stasionary Orbitte* atau *Geo Synchronize* (GSO). GSO adalah wilayah di luar angkasa

²³ Undang-Undang Penyiaran RI No 32 Tahun 2002 pasal 1.

setinggi 35.860 km di atas garis khatulistiwa. Satelit komunikasi yang terletak di GSO dapat meliputi sepertiga dunia. Dengan demikian untuk menghubungkan berbagai tempat di muka bumi diperlukan tiga satelit komunikasi.

3) Sistem Direct Broadcasting Satellite (DBS)

Prinsip dasar sistem DBS ini adalah daya pancar transponder satelit diperbesar dan pancaran diarahkan pada sasaran.

4) Sistem Kabel dan Serat Optik

Pada Sistem Kabel signal listrik disalurkan melalui kabel ke pesawat penerima. Dengan demikian antara stasiun TV dengan pelanggan dihubungkan dengan kabel.

Sedangkan Sistem Serat Optik dipergunakan sebagai alternatif lain dari sistem satelit, karena kemampuan yang dimilikinya untuk menyalurkan signal. Untuk penyaluran signal melalui serat optik, frekuensi signal dimodulasikan dari VHF/UHF ke SHF sampai mendekati kecepatan cahaya. Kemudian signal SHF ini disalurkan melalui serat optik dengan sistem pantul.

Selanjutnya ada juga Sistem Gabungan yaitu penggabungan beberapa sistem yang ada untuk keperluan siaran/penyiaran.²⁴

c. Jenis-Jenis Penyiaran

Ada beberapa jenis penyiaran khususnya yang diakui dalam undang-undang penyiaran RI yaitu sebagai berikut:

²⁴Riswandi, *Dasar-Dasar Penyiaran...*, h. 16-17.

1) **Penyiaran Swasta**

Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang menjalankan usaha penyiaran berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Lembaga ini menjual usaha berupa waktu tayang, iklan, dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Untuk menjalankan usaha penyiaran ini harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Negara setelah memperoleh persetujuan dari Komisi penyiaran Indonesia (KPI).

2) **Penyiaran Publik**

Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang tidak bersifat komersial/ independen/netral dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan publik. Sumber pendanaan penyiaran publik berasal dari negara, iuran, iklan, dan donatur yang tidak mengikat.

Menurut Effendi Gazali, yang dikutip oleh Riswandi terdapat 5 ciri penyiaran publik sebagai berikut:

- a) Akses publik, akses publik di sini dimaksudkan tidak hanya *coverage area* tetapi juga menyangkut bagaimana penyiaran publik mau mengangkat isu-isu lokal dan memproduksi program-program lokal dan tokoh-tokoh lokal.
- b) Dana publik, perlu diingat bahwa lembaga penyiaran publik tidak hanya mengandalkan keuangannya dari anggaran Negara, tetapi juga dari iuran dan donatur.

- c) Akuntabilitas publik, karena dana utamanya dari publik, maka terdapat kewajiban bagi penyiaran publik untuk membuat akuntabilitas finansialnya.
- d) Keterlibatan publik, artinya adanya ketelibatan menjadi penonton atau menjadi kelompok yang rela membantu menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dana untuk kelangsungan penyiaran publik.
- e) Kepentingan publik, kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan iklan. Misalnya ada satu acara yang sangat baik dan bermanfaat bagi publik, namun ratingnya rendah, maka ia akan tetap diproduksi dan tetap dipertahankan penayangannya.

3) Penyiaran Komunitas

Lembaga penyiaran komunitas adalah suatu lembaga yang didirikan oleh komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas penyiaran secara independen/netral, daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, tidak komersial, dan melayani kepentingan komunitas. Karena khusus melayani komunitas, maka lembaga penyiaran komunitas boleh menggunakan bahasa daerah sesuai dengan komunitas yang dilayaninya.

Untuk mendirikan penyiaran komunitas persyaratannya sangat ketat. Antara lain dilarang menjadi media partisipan, tidak terkait dengan organisasi atau lembaga asing dan bukan anggota

komunitas internasional, tidak terkait organisasi terlarang dan tidak untuk kepentingan propaganda.

4) Penyiaran Berlangganan

Lembaga penyiaran berlangganan adalah bentuk penyiaran yang memancarluaskan atau menyalurkan materinya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.²⁵

5. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai Regulator Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah lembaga Negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran, yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan dan hadir sebagai peran serta masyarakat dan berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan peranannya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah Sembilan (9) orang sedangkan untuk KPID berjumlah tujuh (7) orang. Adapun pendanaannya, KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan KPID berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

²⁵Riswandi, *Dasar-Dasar Penyiaran...*, h. 17-19.

Sebagai wujud peran serta masyarakat KPI dan/atau KPID diberi wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat (2) yakni :

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Adapun tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar-benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Secara khusus dalam peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang kelembagaan merumuskan tiga (tiga) hal pokok bidang tugas yang harus dijalankan komisioner yaitu:

- a. Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran melingkupi:
 - 1) Perijinan penyiaran;
 - 2) Penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia;
 - 3) Pengaturan infrastruktur penyiaran;
 - 4) Pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
- b. Bidang pengawasan isi penyiaran melingkupi:
 - 1) Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
 - 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi siaran;
 - 3) Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang; dan

4) Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

c. Bidang kelembagaan melingkupi:

- 1) Penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga KPI dan/atau KPID;
- 2) Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan;
- 3) Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat serta pihak-pihak internasional, dan perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang profesional di bidang penyiaran.²⁶

²⁶Jhon Retei Alfri Sandi Tanjung, *Direktori Perizinan Penyiaran Lembaga Penyiaran di Kalimantan Tengah Tahun 2014 (Regulasi, Proses, Prosedur dan Data Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi)*, Palangka Raya: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, 2014, h. 4-5.